

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Proyek

Entitas Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang memegang peran strategis dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 344.039 organisasi termasuk yayasan yang terdaftar di Indonesia (Sekretariat Kabinet RI, 2019). Sebagai pengelola sumber daya yang berasal dari donatur, pemerintah, dan masyarakat, yayasan memikul tanggung jawab akuntabilitas yang tidak ringan. Undang-Undang Yayasan Pasal 48–49 mewajibkan setiap yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan tahunan. Namun demikian, Yuanita dan Suropto (2022) dalam studi terhadap 97 organisasi nirlaba menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba merupakan yang terendah dibandingkan institusi lainnya, yang berkorelasi langsung dengan kualitas pelaporan keuangan yang masih lemah.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan kerangka standar pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) yang sebelumnya menjadi acuan utama telah digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, yaitu ISAK 35 yang berlaku efektif 1 Januari 2020, kemudian

penomorannya diubah menjadi ISAK 335 berdasarkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) yang berlaku efektif 1 Januari 2024 (IAI, 2022). Selain itu, SAK Entitas Privat (SAK EP) yang disahkan pada 30 Juni 2021 dan berlaku efektif 1 Januari 2025 mengatur pengakuan dan pengukuran bagi entitas privat termasuk yayasan. ISAK 335 mewajibkan penyajian lima laporan keuangan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Faruq dan Aryana, 2024). Meskipun kerangka standar tersebut telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan kesenjangan implementasi yang masih sangat lebar. Julyana et al. (2024) menemukan bahwa yayasan pendidikan Islam berskala kecil hanya melakukan pencatatan kas masuk dan keluar secara sederhana tanpa menyusun laporan keuangan formal, sementara Kurniawan (2024) mendapati sebuah yayasan pendidikan masih berpedoman pada PSAK 45 yang telah dicabut.

Kesenjangan tersebut secara nyata ditemukan pada Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah, sebuah yayasan pendidikan dan sosial yang mengelola Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Ibu Maryati selaku Ketua Yayasan (2026), seluruh pencatatan keuangan dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan Microsoft Excel sederhana yang hanya mencatat kas masuk dan kas keluar, tanpa mengikuti tahapan siklus akuntansi yang terstandarisasi sesuai SAK EP. Kondisi ini menimbulkan sejumlah penyimpangan yang berdampak langsung pada kualitas pelaporan. Pertama, tidak terdapat dokumen jurnal, buku besar, maupun neraca saldo, sehingga tidak ada jejak audit

yang memadai atas setiap transaksi yang terjadi. Kedua, bendahara yang merangkap jabatan Kepala TPQ tanpa latar belakang akuntansi kerap lupa mencatat pengeluaran kecil dan kehilangan bukti transaksi, yang menyebabkan selisih angka pada rekap akhir sehingga keakuratan informasi keuangan tidak dapat dijamin. Ketiga, karena tidak ada sistem pencatatan yang terstruktur sesuai SAK EP, yayasan tidak mampu menghasilkan laporan keuangan dalam format yang disyaratkan ISAK 335, dan hanya dapat menyampaikan rekap pemasukan dan pengeluaran kas dalam rapat evaluasi caturwulan. Akibatnya, pada setiap rapat evaluasi, bendahara tidak dapat menyimpulkan secara pasti kondisi keuangan yayasan, letak kesalahan pencatatan, maupun potensi kekurangan dana secara akurat, sehingga pengambilan keputusan keuangan yayasan menjadi tidak berbasis informasi yang andal.

Meskipun Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah saat ini belum diwajibkan untuk diaudit berdasarkan ambang batas UU Yayasan, penerapan SAK EP dan ISAK 335 tetap mendesak untuk dua alasan utama. Pertama, yayasan berpotensi menerima dana dari pemerintah dan donatur institusional yang semakin besar seiring pertumbuhannya, sehingga kesiapan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi sejak dini merupakan investasi tata kelola yang penting untuk masa depan. Kedua, tanpa sistem pencatatan berbasis SAK EP, yayasan tidak dapat memenuhi kewajiban pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan yang sudah ada, khususnya pemerintah melalui mekanisme BOP. Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang membangun aplikasi web untuk yayasan tidak mengacu standar nirlaba, sedangkan penelitian yang menerapkan SAK EP dan ISAK 335 hanya menggunakan Excel

atau pendekatan manual, dan belum ada penelitian yang mengintegrasikan keduanya sekaligus. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi penelitian “Rancang Bangun Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah Berdasarkan SAK EP dan ISAK 335”, yang bertujuan menghasilkan aplikasi berbasis web lokal yang secara otomatis membantu yayasan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yayasan dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap identifikasi kesenjangan antara kondisi ideal yang seharusnya ada dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil pra-wawancara dengan Ibu Maryati selaku Ketua Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah (2026), ditemukan kesenjangan mendasar dalam pengelolaan keuangan yayasan yang menjadi dasar kebutuhan rancang bangun sistem ini. Aspek-aspek kebutuhan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Kebutuhan Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Web Sesuai SAK EP dan ISAK 335

Terdapat empat kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi dalam pengelolaan keuangan yayasan. Pertama, siklus akuntansi yang terstandarisasi: SAK EP yang berlaku efektif 1 Januari 2025 mewajibkan pencatatan berbasis akrual melalui tahapan penjurnalan, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penutupan buku (IAI, 2021). Kedua, pencatatan transaksi yang akurat dan tidak mudah terlewat: setiap transaksi harus dicatat berdasarkan dokumen sumber yang sah dan lengkap, termasuk transaksi yang bersifat khusus seperti talangan dana

operasional dan donasi barang nonkas (Warren et al., 2020). Ketiga, penyajian lima laporan keuangan sesuai ISAK 335: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2022). Keempat, tersedianya aplikasi berbasis web lokal yang dapat dioperasikan dengan biaya seminimal mungkin, sehingga realistis bagi yayasan kecil (Dharmawan, 2023).

Keempat kondisi ideal tersebut belum terpenuhi di Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah. Dari sisi siklus akuntansi, pencatatan hanya berupa kas masuk dan keluar secara manual tanpa penjurnalan, buku besar, maupun neraca saldo. Dari sisi pencatatan transaksi, bendahara yang merangkap jabatan sering lupa mencatat pengeluaran kecil, nota terselip, dan transaksi unik seperti talangan BOP tidak terakomodasi, sehingga terjadi selisih angka pada rekap akhir. Dari sisi laporan keuangan, tidak satu pun dari lima laporan keuangan yang disyaratkan ISAK 335 pernah disusun; laporan yang ada hanya rekap caturwulan yang tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akuntabel. Dari sisi infrastruktur, yayasan belum memiliki sistem digital apa pun dan tidak mampu menanggung biaya server berbayar (Maryati, 2026).

Pemilihan sistem berbasis aplikasi web sebagai solusi didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu keterbatasan teknis Microsoft Excel dalam memenuhi kebutuhan akuntansi terstandarisasi dan kebutuhan yang tersurat langsung dari pihak yayasan. Dari sisi teknis, Microsoft Excel bersifat *general-purpose spreadsheet* yang tidak dirancang untuk menegakkan siklus akuntansi *double-entry* secara otomatis. Setiap formula harus dibuat secara manual, rentan terhadap

kesalahan penginputan dan penghapusan yang tidak disengaja, serta tidak memiliki mekanisme validasi data yang mencegah kesalahan sebelum terjadi (Romney dan Steinbart, 2021, hlm. 36). Lebih jauh, Excel tidak dapat secara otomatis menghasilkan lima laporan keuangan sesuai ISAK 335 dari data transaksi yang diinput, karena logika akuntansi harus dibangun secara manual oleh pengguna yang memahami akuntansi, suatu kondisi yang bertentangan langsung dengan kenyataan bahwa bendahara yayasan tidak berlatar belakang akuntansi. Sebaliknya, sebuah aplikasi berbasis web menyediakan formulir input terstruktur yang memandu pengguna langkah demi langkah, menegakkan aturan akuntansi secara otomatis pada setiap transaksi yang diinput, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis tanpa memerlukan pemahaman akuntansi mendalam dari penggunanya (Kesuma et al., 2024). Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa aplikasi web lokal tetap memiliki kelemahan, yaitu kebergantungan pada koneksi internet untuk akses *login* bersama dan adanya biaya perangkat keras (server lokal/laptop). Risiko ini diminimalkan dengan menjalankan aplikasi pada satu perangkat lokal melalui XAMPP sehingga tidak membutuhkan biaya *hosting* maupun langganan layanan *cloud*.

Dari sisi kebutuhan lapangan, kebutuhan akan sistem digital ini bukan merupakan asumsi peneliti, melainkan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung oleh Ketua Yayasan. Ibu Maryati menyatakan bahwa yayasan sangat terbuka terhadap sistem yang dapat membuat kerja bendahara lebih mudah dan transparan, dengan syarat eksplisit bahwa sistem tersebut tidak memerlukan biaya sewa server yang mahal (Maryati, 2026). Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi kesiapan dan

penerimaan SDM terhadap penggunaan sistem digital, yang diperkuat oleh fakta bahwa yayasan telah menggunakan komputer dan Excel dalam kegiatan hariannya sehingga hambatan adopsi teknologi dasar tidak ada. Kesiapan SDM dalam mengoperasikan aplikasi web lokal yang memiliki antarmuka sederhana juga akan dijamin melalui penyusunan modul panduan penggunaan sebagai luaran kedua proyek ini, sebagaimana diuraikan pada aspek kebutuhan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah memerlukan aplikasi berbasis web lokal yang mengintegrasikan siklus akuntansi sesuai SAK EP, mengakomodasi seluruh jenis transaksi yang terjadi, dan menghasilkan lima laporan keuangan sesuai ISAK 335 secara otomatis, tanpa memerlukan biaya *hosting* maupun langganan layanan *cloud* yang membebani yayasan. Pilihan sistem berbasis web lokal, bukan Excel, merupakan respons langsung atas kebutuhan yang dinyatakan yayasan sekaligus satu-satunya solusi yang mampu menegakkan siklus akuntansi *double-entry*, mengakomodasi transaksi unik yayasan, dan menghasilkan laporan standar secara otomatis bagi pengguna yang tidak berlatar belakang akuntansi.

2. Kebutuhan Modul Panduan Penggunaan Aplikasi bagi SDM Pengelola Keuangan Yayasan

Ketersediaan sebuah sistem informasi yang baik tidak serta-merta menjamin keberhasilan penggunaannya apabila tidak disertai panduan yang memadai bagi pengguna. Mulyadi (2016, hlm. 11) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang efektif harus dilengkapi dengan prosedur dan instruksi tertulis yang dapat dipahami oleh seluruh pengguna yang mengoperasikannya. Panduan atau modul

penggunaan menjadi komponen penting dalam memastikan keberlanjutan penggunaan sistem, khususnya pada organisasi yang SDM-nya tidak berlatar belakang teknis maupun akuntansi.

Posisi bendahara Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah dirangkap oleh Kepala TPQ yang tidak memiliki latar belakang akuntansi dan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan keuangan berbasis standar. Kondisi ini berpotensi menghambat penggunaan aplikasi yang dibangun apabila tidak tersedia dokumentasi cara penggunaan yang jelas dan mudah dipahami. Tanpa modul panduan, keberlanjutan pengoperasian sistem setelah proyek selesai menjadi tidak terjamin karena pengguna tidak memiliki acuan yang dapat dirujuk secara mandiri.

Yayasan Nur Hidayah Rusmaniah memerlukan modul panduan penggunaan aplikasi yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna nonakuntansi, sehingga SDM pengelola keuangan yayasan dapat mengoperasikan sistem secara mandiri dan berkelanjutan meskipun tanpa pendampingan langsung dari peneliti.

C. Tujuan Proyek

Tujuan proyek merupakan pernyataan terarah mengenai apa yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Setiap tujuan ditetapkan sebagai jawaban langsung atas kesimpulan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada sub-bab Analisis Kebutuhan, sehingga terdapat keselarasan antara permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan hasil yang ingin diwujudkan. Berdasarkan dua aspek kebutuhan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun aplikasi berbasis web lokal yang menerapkan siklus akuntansi sesuai SAK EP dan menghasilkan lima laporan keuangan sesuai ISAK 335 secara otomatis. Aplikasi dirancang untuk mengakomodasi seluruh jenis transaksi keuangan yayasan secara akurat serta dapat dioperasikan tanpa biaya *hosting* maupun langganan layanan *cloud*.

2. Menyusun modul panduan penggunaan aplikasi yang sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna nonakuntansi. Modul ini menjadi acuan bagi SDM pengelola keuangan yayasan agar dapat mengoperasikan sistem secara mandiri dan berkelanjutan sesuai standar yang berlaku.

